

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1995, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andran Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed 1, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan. Jakarta.

_____, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

H. Sisuranto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

John Salindeho, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan kedua Sinar Grafika, Jakarta.

M. Iskandar Syah, 2010, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Pertama Aksara, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

_____, 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya*, PenerbitBuku Kompas, Jakarta.

_____, 2005, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, cetakan kedua Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Maurer, Jeane-luc, 1994, *Pamong Desa or Raja Desa? (Pamong Desa atau Raja Desa ?)*, Terjemahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan, Yogyakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta.

Muhammad Yamin, Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Oloan Sitorus, Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, MitraKebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soenarjo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

Soepomo, 1979, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research*, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Internet

Aliran waduk logung sampai wilayah pati.
https://krjogja.com/web/news/read/41444/Aliran_Waduk_Logung_Kudus_Sampai_Wilayah_Pati diakses 2 Januari 2019.

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah – Tanah Negara

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan